

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Desentralisasi dan Penyediaan Layanan Publik di Negara-Negara Demokrasi yang masih Berkembang

Sumardi^{1*)}, Nasir², Kahar Gani³, Abdul Halim⁴, Nasiratunnisa Mallappiang⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia Jl. Andi Mangerangi No.73, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90121

Email: ¹mardierni69@gmail.com * ²nasirsaja113@gmail.com ³ganikahar5@gmail.com.
⁴abdulhalimlele@gmail.com ⁵nisaunpacti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Send 10/10/2025

Received 15/11/2025

Accepted 27/12/2025

Abstract

This study examines the relationship between decentralization and the provision of public services in developing democratic countries. Decentralization is often considered a governance reform strategy aimed at improving efficiency, responsiveness, and the quality of public services by granting greater authority to local governments. However, the implementation of decentralization in many developing countries has produced varied outcomes, particularly in relation to local government institutional capacity, levels of accountability and transparency, and public participation in service delivery processes. This study aims to analyze how decentralization influences the quality of public service provision in developing democratic states. The research employs a qualitative approach through a systematic literature analysis using NVivo software to identify patterns, themes, and relationships among concepts across previous studies. The findings indicate that decentralization can enhance the quality of public services when supported by adequate local government capacity, transparent and accountable governance systems, and active public participation in decision-making and policy oversight. Conversely, limited institutional capacity and weak oversight mechanisms may lead to disparities in service quality across regions. The study concludes that the success of decentralization in improving public service delivery largely depends on the strength of local governance institutions and the broader democratic governance framework that supports them.

Keywords: decentralization; public services; governance; public participation; developing democracies

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara desentralisasi dan penyediaan layanan publik di negara-negara demokrasi yang masih berkembang. Desentralisasi sering dipandang sebagai strategi reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, implementasi desentralisasi di berbagai negara berkembang menunjukkan hasil yang beragam, terutama terkait kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, tingkat akuntabilitas dan transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desentralisasi memengaruhi kualitas penyediaan layanan

publik di negara-negara demokrasi berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur yang dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dalam berbagai penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik apabila didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang memadai, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat menimbulkan ketimpangan kualitas layanan antar daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan layanan publik sangat bergantung pada kualitas institusi pemerintahan daerah dan sistem tata kelola demokratis yang mendukungnya.

Kata kunci: desentralisasi; layanan publik; tata kelola pemerintahan; partisipasi masyarakat; negara demokrasi berkembang

*)Penulis Korespondensi

E-mail : mardierni69@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu reformasi kelembagaan yang banyak diadopsi oleh negara-negara demokrasi yang masih berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memahami kebutuhan lokal secara lebih baik dibandingkan pemerintah pusat yang cenderung bersifat birokratis dan terpusat (Feng et al., 2022). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, desentralisasi sering dikaitkan dengan peningkatan efisiensi administrasi publik, penguatan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan (Khan et al., 2021).

Perkembangan kebijakan desentralisasi di berbagai negara demokrasi berkembang menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah seringkali diiringi dengan tanggung jawab besar dalam penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur dasar (Esmat et al., 2021). Dalam banyak kasus, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan pelayanan publik karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Misalnya, dalam reformasi desentralisasi di Rwanda sejak tahun 2000, pemerintah daerah menjadi pelaksana utama berbagai kebijakan nasional dan bahkan mengelola lebih dari 25% anggaran domestik serta mempekerjakan sekitar 50% aparat pemerintah nasional dalam struktur administrasi lokal (Cheng et al., 2021).

Layanan publik yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial lainnya (Tufail et al., 2021). Berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia menekankan bahwa desentralisasi layanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Su et al., 2021).

Dalam beberapa kasus, desentralisasi justru menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas administrasi pemerintah daerah, ketimpangan fiskal antarwilayah, serta lemahnya mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Sun et al., 2023). Misalnya, penelitian mengenai desentralisasi layanan publik di beberapa negara Asia menunjukkan bahwa devolusi kewenangan tanpa diiringi peningkatan kapasitas birokrasi daerah dapat menimbulkan inefisiensi dalam penyediaan layanan publik (Y. Chen et al., 2021)

Di Indonesia misalnya, pemerintah daerah mengelola sekitar setengah dari total keuangan publik setelah kebijakan desentralisasi diterapkan, dengan peningkatan transfer fiskal yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam nilai riil. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut tidak selalu diikuti dengan perbaikan yang signifikan dalam indikator layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan (Shan et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Dalam literatur akademik, hubungan antara desentralisasi dan layanan publik telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam studi administrasi publik dan kebijakan pembangunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik melalui peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah serta kedekatan antara penyedia layanan dan masyarakat (Yang et al., 2021). Penelitian mengenai desentralisasi fiskal di Côte d'Ivoire misalnya menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, khususnya dalam sektor pendidikan (Leng et al., 2023). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor seperti transparansi pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta kapasitas birokrasi lokal (Cao, 2022).

Dalam beberapa konteks, desentralisasi justru menimbulkan tantangan baru seperti ketimpangan kapasitas antarwilayah, lemahnya sistem pengawasan, serta potensi fragmentasi kebijakan publik (Zarrin et al., 2021). Beberapa studi literatur menyimpulkan bahwa desentralisasi hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik apabila didukung oleh institusi demokrasi yang kuat, transparansi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan (Oru et al., 2021).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hubungan antara desentralisasi fiskal atau administratif dengan kinerja pelayanan publik di negara tertentu. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara komprehensif menganalisis dinamika desentralisasi dan penyediaan layanan publik di berbagai negara demokrasi berkembang secara tematik dan komparatif. Selain itu, pendekatan analisis kualitatif berbasis perangkat lunak seperti NVivo masih relatif jarang digunakan untuk memetakan pola hubungan antara desentralisasi dan layanan publik dalam literatur akademik. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis tematik berbasis NVivo untuk memetakan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas desentralisasi dalam penyediaan layanan publik.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama yang menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap penyediaan layanan publik di negara-negara demokrasi yang masih berkembang? Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kedua, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi desentralisasi dalam meningkatkan layanan publik? Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor kelembagaan, administratif, maupun sosial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan desentralisasi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi desentralisasi dalam meningkatkan

kualitas layanan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis tematik berbasis NVivo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika desentralisasi serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di negara-negara demokrasi berkembang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan penyediaan layanan publik di negara-negara demokrasi yang masih berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena kebijakan publik secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang bersifat konseptual, normatif, dan empiris. Dalam konteks studi desentralisasi, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan desentralisasi diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi penyediaan layanan publik di tingkat lokal.

Sumber Data

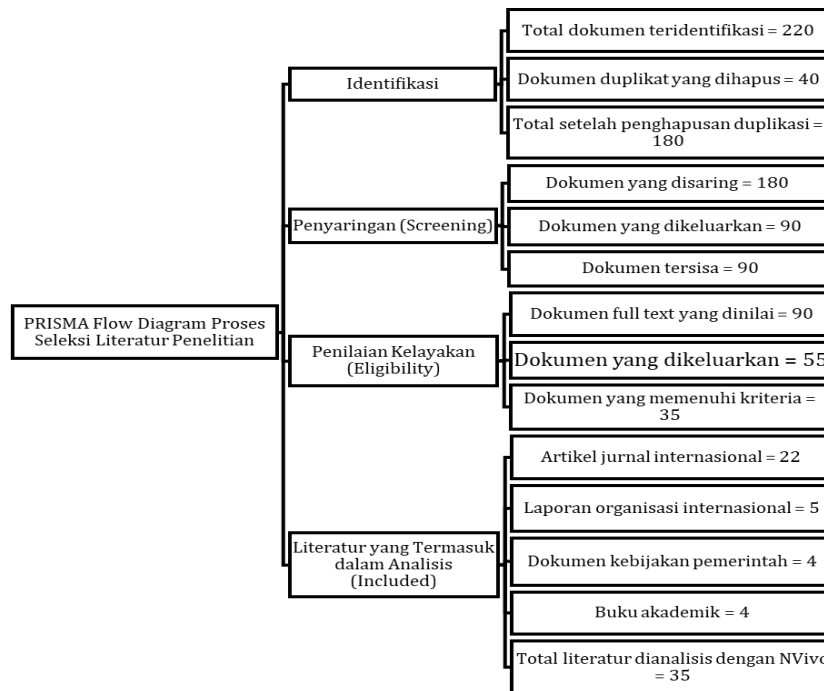
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen akademik dan kebijakan yang relevan dengan topik desentralisasi dan penyediaan layanan publik. Data utama diperoleh dari artikel jurnal internasional yang membahas desentralisasi pemerintahan, tata kelola layanan publik, serta reformasi administrasi publik di negara-negara berkembang. Sumber data lainnya meliputi dokumen kebijakan pemerintah, seperti regulasi, strategi pembangunan nasional, serta dokumen kebijakan terkait reformasi administrasi publik dan pelayanan publik. Penelitian ini juga memanfaatkan buku akademik yang membahas teori administrasi publik, desentralisasi pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan daerah sebagai landasan konseptual penelitian. Berbagai sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan desentralisasi serta implikasinya terhadap penyediaan layanan publik di berbagai negara demokrasi berkembang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan dengan topik desentralisasi pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Pada tahap awal dilakukan identifikasi guna diperoleh sebanyak 220 dokumen yang terdiri dari artikel jurnal internasional, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta buku akademik yang membahas desentralisasi dan administrasi publik. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan awal dengan menghapus 40 dokumen duplikat, sehingga tersisa 180 dokumen yang kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Pada tahap ini diterapkan kriteria eksklusi, yaitu dokumen yang tidak membahas desentralisasi pemerintahan, tidak berkaitan dengan layanan publik, berfokus pada negara maju, atau tidak termasuk dalam kategori publikasi ilmiah yang kredibel.

Tahap selanjutnya adalah penilaian kelayakan dokumen, pada tahap ini diterapkan kriteria inklusi, yaitu dokumen yang secara eksplisit membahas hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan penyediaan layanan publik, memiliki fokus pada negara demokrasi berkembang, dipublikasikan dalam sumber

ilmiah yang kredibel. Berdasarkan proses seleksi tersebut, sebanyak 55 dokumen dieliminasi, sehingga diperoleh 35 dokumen yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, temuan penelitian, serta argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi desentralisasi dalam penyediaan layanan publik.



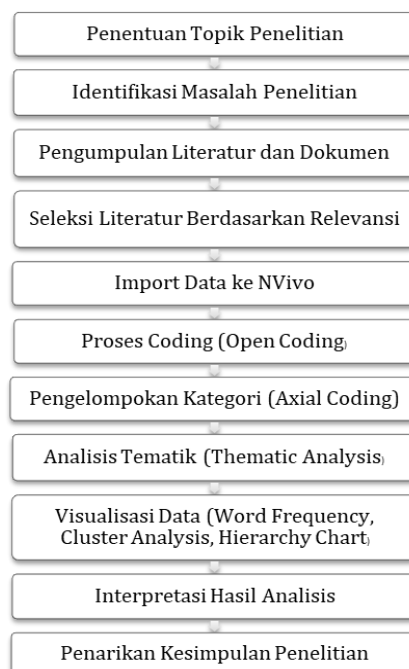
Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Literatur Menggunakan Metode PRISMA

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu analisis data kualitatif. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti untuk mengorganisasikan, mengkodekan, serta menganalisis berbagai dokumen penelitian secara sistematis. Tahap pertama dalam proses analisis adalah pengumpulan dan pengorganisasian data, yaitu mengimpor seluruh dokumen literatur yang telah diseleksi ke dalam perangkat lunak NVivo untuk memudahkan proses pengelolaan data. Tahap kedua adalah proses coding (open coding), yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dalam literatur terkait desentralisasi dan penyediaan layanan publik.

Tahap selanjutnya adalah pengelompokan kategori (axial coding), yaitu mengelompokkan berbagai kode yang memiliki keterkaitan konseptual ke dalam kategori yang lebih luas. Setelah itu dilakukan identifikasi tema utama (thematic analysis) untuk menemukan tema-tema utama yang menjelaskan bagaimana desentralisasi memengaruhi penyediaan layanan publik di negara demokrasi berkembang. Tahap akhir dalam analisis data adalah visualisasi data menggunakan fitur NVivo, seperti word frequency untuk mengidentifikasi konsep yang paling sering muncul dalam literatur, cluster analysis untuk melihat hubungan antar konsep, serta hierarchy chart untuk memetakan struktur kategori tematik yang dihasilkan dari proses analisis data.

Bagan Alur Desain Penelitian



Gambar 2. Bagan Alur Desain Penelitian

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Hasil Pengumpulan Data

Tabel 1. Pengumpulan dan Pengorganisasian Data

Tahap Identifikasi Data	Jenis Sumber Data	Jumlah Dokumen
Artikel jurnal internasional	Publikasi ilmiah tentang desentralisasi dan layanan publik	145
Laporan organisasi internasional	Laporan kebijakan dan pembangunan	28
Dokumen kebijakan pemerintah	Regulasi dan strategi pembangunan nasional	22
Buku akademik	Literatur teori administrasi publik dan desentralisasi	25
Total dokumen teridentifikasi		220
Penghapusan dokumen duplikat	Dokumen dengan sumber yang sama	40
Dokumen setelah penghapusan duplikasi		180
Seleksi judul dan abstrak	Tidak relevan dengan topik penelitian	90
Seleksi full text (kriteria eksklusi)	Metodologi tidak jelas / tidak relevan	55
Dokumen yang dianalisis menggunakan NVivo		35

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2026

Tahap pengumpulan dan pengorganisasian data merupakan tahap awal dalam analisis menggunakan NVivo. Pada tahap ini diperoleh 220 dokumen dari berbagai sumber akademik dan kebijakan yang relevan dengan penelitian. Setelah dilakukan penghapusan dokumen duplikat sebanyak 40 dokumen, tersisa 180 dokumen yang kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Sebanyak 90 dokumen dieliminasi karena tidak relevan dengan topik penelitian, sementara 55 dokumen lainnya dikeluarkan setelah evaluasi teks penuh karena tidak memenuhi

kriteria inklusi penelitian. Dengan demikian, diperoleh 35 dokumen yang digunakan sebagai sumber data utama dalam proses analisis NVivo.

Hasil Coding Data

Tabel 2. Proses Coding (Open Coding)

Kode Awal	Deskripsi Konsep	Jumlah Referensi
Desentralisasi pemerintahan	Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah	28
Kualitas layanan publik	Efektivitas dan akses layanan publik	24
Kapasitas pemerintah daerah	Kemampuan administratif dan kelembagaan daerah	20
Akuntabilitas dan transparansi	Mekanisme pengawasan dan keterbukaan pemerintahan	18
Partisipasi masyarakat	Keterlibatan publik dalam kebijakan layanan	17

Sumber: Hasil analisis NVivo peneliti, 2026

Pada tahap ini peneliti memberikan kode pada bagian teks yang mengandung konsep penting terkait hubungan antara desentralisasi dan layanan publik. Hasil proses coding menunjukkan bahwa konsep yang paling banyak muncul dalam literatur adalah desentralisasi pemerintahan, kualitas layanan publik, kapasitas pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintahan, serta partisipasi masyarakat.

Implementasi Desentralisasi Negara Demokrasi

Tabel 6. Pola Implementasi Desentralisasi di Negara Demokrasi Berkembang

No	Tema / Pola Implementasi	Deskripsi Temuan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis NVivo
1	Desentralisasi Administratif	Pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.	Artikel jurnal internasional, buku administrasi publik	Studi literatur dan analisis dokumen	Open coding dan axial coding
2	Desentralisasi Fiskal	Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran daerah, termasuk transfer fiskal dan pendapatan asli daerah untuk mendukung layanan publik.	Laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah	Studi literatur dan analisis dokumen	Open coding dan thematic analysis
3	Desentralisasi Politik	Peningkatan kewenangan politik pemerintah daerah melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis serta penguatan institusi lokal.	Artikel jurnal politik dan governance	Studi literatur	Axial coding dan cluster analysis
4	Desentralisasi Pelayanan Publik	Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan,	Laporan lembaga internasional dan dokumen kebijakan	Analisis dokumen kebijakan	Thematic analysis

No	Tema / Pola Implementasi	Deskripsi Temuan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis NVivo
5	Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lokal	kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik melalui mekanisme partisipatif di tingkat lokal.	Buku akademik dan artikel penelitian	Studi literatur	Word frequency dan hierarchy chart

Sumber: Hasil analisis data literatur menggunakan NVivo (2026)

Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan bahwa pola implementasi desentralisasi di negara-negara demokrasi yang masih berkembang memiliki karakteristik yang beragam, namun memperlihatkan kecenderungan umum bahwa desentralisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal dan politik yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates melalui konsep decentralization theorem, yang menyatakan bahwa pelayanan publik akan lebih efisien apabila disediakan oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yang dilayaninya. Teori ini menekankan bahwa pemerintah lokal memiliki keunggulan informasi mengenai preferensi masyarakat sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dibandingkan pemerintah pusat (T. Chen et al., 2021). Selain itu, temuan penelitian ini juga konsisten dengan pendekatan multi-level governance yang menekankan pentingnya koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam penyediaan layanan publik (Osborne et al., 2022).

Namun di negara lain, desentralisasi justru menimbulkan tantangan baru, terutama ketika kapasitas administratif pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada faktor pendukung seperti kapasitas birokrasi lokal, sistem akuntabilitas publik, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Bianchi et al., 2021). Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, desentralisasi berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas layanan antar daerah karena kemampuan pemerintah lokal dalam mengelola layanan publik berbeda-beda.

Tak hanya itu, desentralisasi dapat memperbesar ketimpangan antar wilayah apabila distribusi sumber daya fiskal tidak merata. Dengan kata lain, desentralisasi dapat menghasilkan dua kemungkinan hasil yang berbeda, yaitu peningkatan kualitas layanan publik di satu sisi, tetapi juga potensi fragmentasi kebijakan di sisi lain (Agostino et al., 2022). Perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak desentralisasi terhadap layanan publik sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh desain kelembagaan, sistem fiskal, serta tingkat kematangan demokrasi di masing-masing negara. Desentralisasi juga membuka peluang bagi munculnya inovasi kebijakan di tingkat lokal, terutama dalam pengelolaan layanan publik yang lebih efisien dan partisipatif (Ansell & Torfing, 2021).

Kualitas Layanan Publik Terhadap Sistem Desentralisasi

Tabel 7. Kualitas Layanan Publik dalam Sistem Desentralisasi

No	Tema / Indikator Kualitas Layanan Publik	Deskripsi Temuan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis NVivo
1	Aksesibilitas Layanan Publik	Desentralisasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik karena pelayanan diselenggarakan lebih dekat dengan masyarakat.	Artikel jurnal internasional tentang administrasi publik dan desentralisasi	Studi literatur dan analisis dokumen	Open coding dan thematic analysis
2	Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan	Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola program layanan publik sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas program pelayanan.	Laporan organisasi internasional dan dokumen kebijakan pemerintah	Studi literatur	Axial coding
3	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan	Desentralisasi mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah melalui mekanisme pengawasan lokal serta keterbukaan informasi publik.	Buku akademik dan laporan tata kelola pemerintahan	Analisis dokumen	Thematic analysis dan cluster analysis
4	Responsivitas Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah lebih mampu merespons kebutuhan masyarakat karena memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi lokal.	Artikel jurnal kebijakan publik	Studi literatur	Open coding
5	Inovasi Pelayanan Publik	Desentralisasi mendorong munculnya berbagai inovasi pelayanan publik di tingkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.	Dokumen kebijakan dan laporan reformasi administrasi publik	Analisis dokumen kebijakan	Word frequency dan hierarchy chart

Sumber: Hasil analisis data literatur menggunakan NVivo (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi di negara-negara demokrasi yang masih berkembang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda di setiap negara. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat memungkinkan proses perencanaan kebijakan pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran (Engen et al., 2021).

Di beberapa negara, desentralisasi berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal karena pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas

anggaran serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Gesik & Leyer, 2022). Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kesiapan institusional pemerintah daerah. Di wilayah yang memiliki kapasitas administrasi yang lemah atau sumber daya fiskal yang terbatas, desentralisasi justru dapat menimbulkan ketimpangan kualitas layanan publik antar daerah.

Selain itu, dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk membangun mekanisme partisipatif dalam penyediaan layanan publik, misalnya melalui konsultasi publik, forum masyarakat, atau mekanisme pengaduan layanan (J. Zhang et al., 2022). Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pelayanan publik karena masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah mendorong munculnya berbagai inovasi pelayanan seperti digitalisasi layanan administrasi, sistem pelayanan terpadu, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik (Cagigas et al., 2021). Namun demikian, penelitian lain juga menemukan bahwa desentralisasi dapat menimbulkan variasi kualitas pelayanan yang cukup besar antar daerah. Perbedaan tersebut biasanya disebabkan oleh ketimpangan kapasitas fiskal, kualitas kepemimpinan daerah, serta tingkat profesionalisme birokrasi lokal (Trischler & Westman Trischler, 2022). Selain itu, desentralisasi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik karena masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk memantau kinerja pemerintah daerah (Song et al., 2024).

Partisipasi Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Tabel 10. Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Layanan Publik

No	Dimensi Partisipasi Masyarakat	Deskripsi Temuan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis NVivo
1	Partisipasi dalam Perencanaan Kebijakan Publik	Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik dan mekanisme musyawarah pembangunan lokal.	Artikel jurnal administrasi publik	Studi literatur dan analisis dokumen	Open coding
2	Partisipasi dalam Pengawasan Layanan Publik	Masyarakat berperan dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.	Laporan organisasi internasional dan dokumen kebijakan	Studi literatur	Axial coding
3	Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan Lokal	Desentralisasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan lokal dan forum dialog masyarakat.	Buku akademik dan artikel kebijakan publik	Analisis dokumen	Thematic analysis
4	Peran Organisasi Masyarakat Sipil	Organisasi masyarakat sipil berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan	Artikel jurnal governance dan laporan lembaga internasional	Studi literatur	Open coding dan cluster analysis

No	Dimensi Partisipasi Masyarakat	Deskripsi Temuan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis NVivo
5	Partisipasi Digital dalam Tata Kelola Publik	kepentingan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memberikan umpan balik terhadap layanan publik secara lebih cepat dan terbuka.	Dokumen kebijakan digital governance dan laporan inovasi pelayanan publik	Analisis dokumen kebijakan	Word frequency dan hierarchy chart

Sumber: Hasil analisis data literatur menggunakan NVivo (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan publik dalam sistem desentralisasi di negara-negara demokrasi berkembang. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa desentralisasi tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola layanan publik, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pelayanan publik. Makna utama dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan aspirasi warga, sehingga kebijakan layanan publik yang dihasilkan menjadi lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Apabila dikaitkan dengan perspektif teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi demokratis yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein melalui konsep Ladder of Citizen Participation. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolik hingga partisipasi yang memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks desentralisasi, peningkatan partisipasi masyarakat dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih demokratis antara pemerintah daerah dan warga negara (Hou et al., 2022). Selain itu, temuan penelitian ini juga berkaitan dengan pendekatan participatory governance yang menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Ralapanawa & Sivakanesan, 2021). Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya memindahkan kewenangan administratif dari pusat ke daerah, tetapi juga memperluas ruang demokrasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pelayanan publik.

Analisis temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan publik dalam sistem desentralisasi. Ketika masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan pelayanan publik, pemerintah daerah cenderung lebih responsif dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Partisipasi masyarakat juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan layanan publik. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat bahkan mampu

mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik, seperti melalui inisiatif komunitas lokal atau kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (Islam et al., 2021). Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem desentralisasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, akses terhadap informasi publik, serta budaya politik yang berkembang di suatu negara.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai studi yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat karena proses pengambilan keputusan berada lebih dekat dengan warga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, musyawarah pembangunan daerah, atau sistem pengaduan masyarakat cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih baik dibandingkan daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah (Kirikkaleli & Adebayo, 2021). Namun demikian, penelitian lain juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal dalam sistem desentralisasi, terutama apabila terdapat hambatan struktural seperti rendahnya akses informasi publik, dominasi elit politik lokal, atau lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil (Xiao et al., 2022). Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas institusi demokrasi serta dukungan kebijakan yang mendorong keterlibatan publik secara luas.

Salah satu kelebihan utama adalah meningkatnya legitimasi kebijakan publik karena keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan karena masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara langsung (Shi et al., 2020). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan publik, serta potensi dominasi kelompok kepentingan tertentu dalam proses partisipasi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan strategi yang komprehensif agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting bagi negara-negara demokrasi berkembang dalam mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam sistem desentralisasi. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif dan terbuka agar masyarakat dari berbagai kelompok sosial dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan layanan publik. Kedua, diperlukan peningkatan transparansi informasi publik agar masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi kebijakan pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil serta mendorong pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kewenangan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi partisipatif dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan publik di negara-negara demokrasi berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan penyediaan layanan publik di negara-negara demokrasi yang masih berkembang, terutama melalui penguatan kewenangan pemerintah daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Sebaliknya, kapasitas institusional pemerintah daerah masih terbatas dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara efektif, desentralisasi berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas layanan antar wilayah serta berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh distribusi kewenangan administratif dan fiskal, tetapi juga oleh kualitas institusi demokrasi, kapasitas birokrasi daerah, serta mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis yang dilakukan lebih menekankan pada kajian konseptual dan komparatif sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris yang lebih luas pada berbagai konteks negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris yang lebih mendalam dengan memanfaatkan data kuantitatif maupun studi kasus lintas negara agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara desentralisasi dan kualitas layanan publik, sekaligus mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi desentralisasi dalam sistem pemerintahan demokratis.

PENGHARGAAN

Ucapan Selamat kepada pihak Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Makassar, Khususnya Kepada Dr. Anirwan, S.IP., M,Adm KP Selaku Direktur dan Dr. Nasir, M.Si Selaku Ketua Prodi S2 Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Makassar

REFERENSI

- Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 152–176. <https://doi.org/10.1111/faam.12301>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy & Politics*, 49(2), 211–230. <https://doi.org/10.1332/030557321X16115951196045>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Cagigas, D., Clifton, J., Diaz-Fuentes, D., & Fernandez-Gutierrez, M. (2021). Blockchain for Public Services: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 9, 13904–13921. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3052019>
- Cao, L. (2022). Decentralized AI: Edge Intelligence and Smart Blockchain, Metaverse, Web3, and DeSci. *IEEE Intelligent Systems*, 37(3), 6–19. <https://doi.org/10.1109/MIS.2022.3181504>
- Chen, T., Guo, W., Gao, X., & Liang, Z. (2021). AI-based self-service technology in

- public service delivery: User experience and influencing factors. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101520. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101520>
- Chen, Y., Richter, J. I., & Patel, P. C. (2021). Decentralized Governance of Digital Platforms. *Journal of Management*, 47(5), 1305–1337. <https://doi.org/10.1177/0149206320916755>
- Cheng, Y., Awan, U., Ahmad, S., & Tan, Z. (2021). How do technological innovation and fiscal decentralization affect the environment? A story of the fourth industrial revolution and sustainable growth. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120398. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120398>
- Engen, M., Fransson, M., Quist, J., & Skålen, P. (2021). Continuing the development of the public service logic: a study of value co-destruction in public services. *Public Management Review*, 23(6), 886–905. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1720354>
- Esmat, A., de Vos, M., Ghiassi-Farrokhfal, Y., Palensky, P., & Epema, D. (2021). A novel decentralized platform for peer-to-peer energy trading market with blockchain technology. *Applied Energy*, 282, 116123. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.116123>
- Feng, S., Zhang, R., & Li, G. (2022). Environmental decentralization, digital finance and green technology innovation. *Structural Change and Economic Dynamics*, 61, 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.008>
- Gesk, T. S., & Leyer, M. (2022). Artificial intelligence in public services: When and why citizens accept its usage. *Government Information Quarterly*, 39(3), 101704. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101704>
- Hou, X., Feng, L., Dai, Y., Hu, C., Gibson, L., Tang, J., Lee, Z., Wang, Y., Cai, X., Liu, J., Zheng, Y., & Zheng, C. (2022). Global mapping reveals increase in lacustrine algal blooms over the past decade. *Nature Geoscience*, 15(2), 130–134. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00887-x>
- Islam, T., Islam, R., Pitafi, A. H., Xiaobei, L., Rehmani, M., Irfan, M., & Mubarak, M. S. (2021). The impact of corporate social responsibility on customer loyalty: The mediating role of corporate reputation, customer satisfaction, and trust. *Sustainable Production and Consumption*, 25, 123–135. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.07.019>
- Khan, Z., Ali, S., Dong, K., & Li, R. Y. M. (2021). How does fiscal decentralization affect CO2 emissions? The roles of institutions and human capital. *Energy Economics*, 94, 105060. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.105060>
- Kirikaleli, D., & Adebayo, T. S. (2021). Do renewable energy consumption and financial development matter for environmental sustainability? New global evidence. *Sustainable Development*, 29(4), 583–594. <https://doi.org/10.1002/sd.2159>
- Leng, J., Zhong, Y., Lin, Z., Xu, K., Mourtzis, D., Zhou, X., Zheng, P., Liu, Q., Zhao, J. L., & Shen, W. (2023). Towards resilience in Industry 5.0: A decentralized autonomous manufacturing paradigm. *Journal of Manufacturing Systems*, 71, 95–114. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.08.023>
- Oru, E., Trickey, A., Shirali, R., Kanters, S., & Easterbrook, P. (2021). Decentralisation, integration, and task-shifting in hepatitis C virus infection testing and treatment: a global systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*, 9(4), e431–e445. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30505-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30505-2)
- Ralapanawa, U., & Sivakanesan, R. (2021). Epidemiology and the Magnitude of Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome: A Narrative Review.

- Journal of Epidemiology and Global Health*, 11(2), 169.
<https://doi.org/10.2991/jegh.k.201217.001>
- Shan, S., Ahmad, M., Tan, Z., Adebayo, T. S., Man Li, R. Y., & Kirikkaleli, D. (2021). The role of energy prices and non-linear fiscal decentralization in limiting carbon emissions: Tracking environmental sustainability. *Energy*, 234, 121243. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121243>
- Shi, T., Denouel, A., Tietjen, A. K., Campbell, I., Moran, E., Li, X., Campbell, H., Demont, C., Nyawanda, B. O., Chu, H. Y., Stoszek, S. K., Krishnan, A., Openshaw, P., Falsey, A. R., Nair, H., Nair, H., Campbell, H., Shi, T., Zhang, S., ... Rosen, B. (2020). Global Disease Burden Estimates of Respiratory Syncytial Virus–Associated Acute Respiratory Infection in Older Adults in 2015: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journal of Infectious Diseases*, 222(Supplement 7), S577–S583. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiz059>
- Song, L., Kong, X., & Cheng, P. (2024). Supply-demand matching assessment of the public service facilities in 15-minute community life circle based on residents' behaviors. *Cities*, 144, 104637. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104637>
- Su, C.-W., Umar, M., & Khan, Z. (2021). Does fiscal decentralization and eco-innovation promote renewable energy consumption? Analyzing the role of political risk. *Science of The Total Environment*, 751, 142220. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142220>
- Sun, T., Li, D., & Wang, B. (2023). Decentralized Federated Averaging. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(4), 4289–4301. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2022.3196503>
- Trischler, J., & Westman Trischler, J. (2022). Design for experience – a public service design approach in the age of digitalization. *Public Management Review*, 24(8), 1251–1270. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1899272>
- Tufail, M., Song, L., Adebayo, T. S., Kirikkaleli, D., & Khan, S. (2021). Do fiscal decentralization and natural resources rent curb carbon emissions? Evidence from developed countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(35), 49179–49190. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13865-y>
- Xiao, P.-L., Cui, A.-Y., Hsu, C.-J., Peng, R., Jiang, N., Xu, X.-H., Ma, Y.-G., Liu, D., & Lu, H.-D. (2022). Global, regional prevalence, and risk factors of osteoporosis according to the World Health Organization diagnostic criteria: a systematic review and meta-analysis. *Osteoporosis International*, 33(10), 2137–2153. <https://doi.org/10.1007/s00198-022-06454-3>
- Yang, Q., Wang, H., Wang, T., Zhang, S., Wu, X., & Wang, H. (2021). Blockchain-based decentralized energy management platform for residential distributed energy resources in a virtual power plant. *Applied Energy*, 294, 117026. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117026>
- Zarrin, J., Wen Phang, H., Babu Saheer, L., & Zarrin, B. (2021). Blockchain for decentralization of internet: prospects, trends, and challenges. *Cluster Computing*, 24(4), 2841–2866. <https://doi.org/10.1007/s10586-021-03301-8>
- Zhang, J., Chen, W., Petrovsky, N., & Walker, R. M. (2022). The <scp>Expectancy-Disconfirmation</scp> Model and Citizen Satisfaction with Public Services: A Meta-analysis and an Agenda for Best Practice. *Public Administration Review*, 82(1), 147–159. <https://doi.org/10.1111/puar.13368>